



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUPITO
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 782202

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **6.614.000.000**

1. Tanah Seluas 2.941 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, WARISAN Rp. 1.764.000.000
2. Tanah Seluas 1.805 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/150 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
4. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
5. Tanah Seluas 270 m2 di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
6. Tanah Seluas 25.000 m2 di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/240 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.050.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **204.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, MITSUBHISI KELUARGA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000



3. MOTOR, YAMAHA BBP-A A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 15.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 531.749.987

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 7.364.749.987

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 7.364.749.987

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.